

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Beberapa tahun terakhir telah terjadi perubahan pandangan terhadap lingkungan bisnis, apabila perusahaan yang ingin bersaing harus lebih transparan dalam mengungkapkan informasinya sehingga dapat mendukung dalam pengambilan keputusan. Fokus perusahaan pada saat ini yaitu bagaimana caranya untuk bertahan (*sustain*) dalam persaingan bisnis. Tiga hal yang dapat menjamin keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang adalah *economic*, *enviromental*, dan *social* (Muallifin & Priyadi, 2016).

Menurut Elkington J (dalam Hadad & Maftucha, 2015, hlm. 253) saat ini tujuan bisnis tidak hanya mencari keuntungan (*profit*), tetapi juga bertanggungjawab kepada masyarakat (*people*) dan bumi (*planet*). Ketiga hal ini dikenal dengan konsep *triple bottom line*. Konsep *triple bottom line* menjadi kunci penggerak suksesnya pelaksanaan keberlanjutan. Dengan adanya perubahan paradigma keberlanjutan, diharapkan suatu usaha/bisnis dapat berjalan sesuai dengan cita-cita pembangunan berkelanjutan. Menurut *Brundtland Report* (dalam M.Rachman, Efendi, & Wicaksana, 2011, hlm. 11). Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai “Proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan sebagainya) yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”.

Menurut Dilling (2010) pada penelitiannya mengungkapkan bahwa para pemimpin perusahaan-perusahaan dunia semakin menyadari bahwa pengungkapan laporan yang lebih komprehensif (tidak hanya sekedar laporan keuangan) akan mendukung strategi perusahaan. Selain itu dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap *sustainable development*. Oleh karena itu, Seiring dengan pengembangan keberlanjutan usaha/bisnis suatu industri harus melaporkan bentuk tanggung jawabnya secara berkala kepada publik sehingga masyarakat dapat turut serta dalam menilai kinerja sebuah industri, laporan

tersebut adalah *sustainability report* atau laporan keberlanjutan (Hadad & Maftucha, 2015, hlm. 257).

Sustainability report sulit dibedakan dari CSR, keduanya merupakan bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Salah satu hal yang dapat membedakan antara *sustainability report* dengan CSR adalah cara pengungkapannya. Menurut Soelistyoningrum (dalam Muallifin & Priyadi, 2016), pengungkapan CSR terintegrasi dengan laporan tahunan perusahaan, sedangkan pengungkapan *sustainability report* lebih terperinci dan berdiri sendiri.

Sustainability report merupakan praktek pengukuran, pengungkapan dan upaya akuntabilitas dari *sustainability activities* yang bertujuan untuk tercapainya *sustainable development*. Pengembangan yang berkelanjutan (*sustainable development*) yang dilakukan oleh Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan karena adanya dukungan dari *stakeholder* (Muallifin & Priyadi, 2016).

Selain itu menurut Hadad & Maftucha (2015, hlm. 260) laporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) adalah bentuk laporan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam rangka untuk mengungkapkan atau mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai kinerja ekonomi, lingkungan hidup dan sosial masyarakat secara akuntabel. Berikut merupakan gambaran dari isi *sustainability report* pada beberapa bank.

Tabel 1.1
Ringkasan Isi Sustainability Report Pada Bank

	BJB
Kinerja Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan total aset 16,92 %, 88, 9 triliun. - Peningkatan laba bersih 24,66 %, 1,381 triliun. - Pembayaran pajak kepada pemerintah 385,43 miliar. - Dana untuk CSR maksimal 5% setiap tahun, pada tahun 2015 sebesar 53,86 miliar.
Kinerja Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan bank memiliki dokumen kebijakan perkreditan bank, seperti kebijakan penilaian prospek usaha debitur dalam mengelola lingkungan hidup. - Menjelaskan penghematan konsumsi energi listrik dan bbm. - Menjelaskan pengurangan pemakaian kertas. - Menjelaskan CSR pada bidang lingkungan hidup seperti pengadaan 1000 tempat sampah untuk kendaraan angkot di Bandung, pembuatan saluran air limbah di tangerang, pengadaan mesin pencacah sampah.

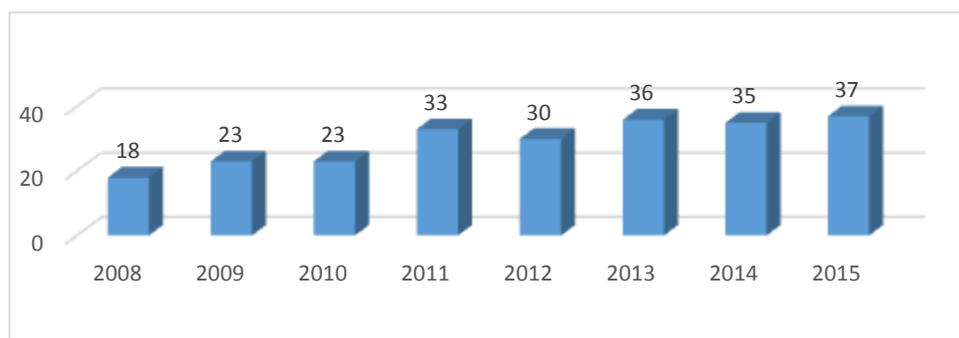
Kinerja Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Memfasilitasi akses kredit bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sektor usaha mikro, kecil dan menengah. - Bidang kesehatan : air bersih BJB, operasi katarak, pemeriksaan gratis, Khitan, Donor darah, bantuan peralatan kesehatan, mobil ambulance. - Bidang sosial masyarakat : bakti sosial, santunan anak yatim piatu, memberikan modal usaha, pelatihan wirausaha. - Bidang Pendidikan : membangun, memperbaiki ruang kelas, taman baca.
BRI	
Kinerja Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan laba bersih tahun 2015 menjadi 25, 410 M, total aset 878,426 M, pajak pemerintah 7,103 M. - Penjelasan komposisi pinjaman berdasarkan jenis perusahaan.
Kinerja Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya penghematan energi listrik dengan penggunaan <i>power supply</i> ATM tenaga surya. - Untuk penghematan kertas BRI membangun <i>electronic office (e-office)</i>, pemakaian kertas tahun 2015 31,985 rim dengan biaya pendaan 1,218 juta. - Program Indonesia lestari, penyaluran 500 ribu liter air bersih, menanam 10.000 bibit pohon jabon di danau tamblingan denpasar, konservasi penyu dengan dana 30 juta.
Kinerja Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dengan pembangunan teras BRI kapal yang dilaksanakan di kepulauan seribu. - Menjelaskan keunggulan insan/karyawan BRI, tingkat perputaran pekerja, berdasarkan usia, gender, menjelaskan remunerasi dan tunjangan pekerja. - Program indonesia membangun, pembangunan halte dengan BRI memberikan dana 130 juta, pembuatan instalasi air bersih dana 198 juta. - Program Indonesia takwa, bantuan pembangunan mesjid di Aceh dana yang dikeluarkan 43,9 juta, bantuan fasilitas ibadah di gereja katolik manado, kupang.
OCBC NISP	
Kinerja Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan laba bersih sebesar Rp 1,5 triliun atau naik 12,7% dari Rp 1,3 triliun pada tahun 2014. - Menjelaskan portofolio kredit berdasarkan sektor dan segmen. - Dana untuk program csr yang sebesar 14,006 triliun dengan rincian program lingkungan hidup 539 triliun, pendidikan 9,829 triliun, sosial masyarakat 3,638 triliun.
Kinerja Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang lingkungan difokuskan pada kegiatan pengadaan air yang layak bagi untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. - Untuk Program peduli lingkungan dana yang dikeluarkan sebesar Rp 382.077.881. - Melakukan pengelolaan timbunan limbah sampah dokumen kegiatan operasi bank.

Kinerja Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Kompensasi dan benefit pada kryawan dengan memberikan fasilitas pinjaman dan beasiswa. - Bidang pendidikan yaitu program I love Science untuk siswa SD dnegan peserta 534 orang, total dana Rp 449,102, 653. program <i>Young Entrepreneurship Spirit (YES)</i> dikalangan mahasiswa dana yang dikeluarkan Rp 223.218.714, beasiswa sebesar 350 juta disalurkan kepada 48 mahasiwsa di berbagai universitas.
----------------	---

Hadad & Maftucha (2015, hlm. 259) menyatakan bahwa laporan keberlanjutan penting untuk sebuah industri dan organisasi salah satunya didasari untuk mengurangi potensi risiko bisnis. Dia mengatakan bahwa

Melalui laporan keberlanjutan, peningkatan kinerja pada isu-isu tertentu bisa secara efektif diukur dan dapat dikelola dengan mengambil peran proaktif dalam mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan langkah-langkah yang diambil oleh organisasi untuk mengurangi potensi risiko bisnis dengan tetap mempertahankan para pemegang saham.

Di Indonesia perkembangan *sustainability report* didukung oleh sebuah organisasi yaitu *National Center for Sustainability Report (NCSR)* yang merupakan organiasi independen yang berfungsi untuk mengembangkan standar dan meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan. Sebagai bentuk penghargaan kepada perusahaan yang telah mengungkapkan *sustainability report*, setiap tahunnya NCSR mengadakan *sustainability reporting awards (SRA)* yaitu dengan memberikan penghargaan kepada setiap perusahaan yang telah melakukan, mengembangkan, dan mengungkapkan *sustainability report*-nya dengan baik sesuai standar GRI yang telah ditentukan.



(Sumber : sra.ncsr-id.org)

Gambar 1.1
Perusahaan yang mengikuti *Sustainability Reporting Awards* di Indonesia

Dari gambar tersebut bisa terlihat bahwa jumlah perusahaan yang mengikuti *Sustainability Award* di Indonesia dari tahun 2008 hingga 2011 terus meningkat, namun dari tahun 2011 ke 2012 terjadi penurunan jumlah yang mengikuti SRA, dan pada tahun 2013 terjadi lagi peningkatan menjadi 36 perusahaan yang mengikuti SRA, dan pada tahun 2014 terjadi lagi penurunan menjadi 35 perusahaan.

Pengungkapan *sustainability report* di kebanyakan negara, termasuk Indonesia masih bersifat *voluntary*, artinya perusahaan dengan sukarela menerbitkannya dan tidak ada aturan yang mewajibkan seperti halnya pada penerbitan *financial reporting* (Nasir, Ilham, & Utara, 2014). Namun menurut Utama (dalam Nasir dkk., 2014) meskipun pengungkapan *Sustainability Report* tidak diwajibkan untuk perusahaan, akan tetapi tuntutan bagi perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan, akuntabel, serta praktik tata kelola perusahaan yang semakin baik (*good corporate governance*) mengharuskan perusahaan untuk melakukan pengungkapan yang bersifat sukarela, seperti pengungkapan mengenai aktivitas sosial dan lingkungan.

Dilihat dari pertumbuhan perusahaan yang membuat *sustainability report* semakin meningkat, sudah terlihat bahwa walaupun masih bersifat sukarela perusahaan-perusahaan mulai menyadari bahwa pengungkapan *sustainability report* merupakan tuntutan agar perusahaan bisa bertahan, tidak terkecuali dengan perusahaan perbankan yang ada di Indonesia. Beberapa bank telah membuat dan mengungkapkan *sustainability report*.

Tabel 1.2
Bank yang mengungkapkan *Sustainability Report*

Jenis	Jumlah	Publikasi
Bank Persero	4	4
Bank Umum Swasta Nasional Devisa	35	6
Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa	30	0
Bank Campuran	15	0
Bank Pembangunan Daerah	26	4
Bank Asing	10	0
	122	14

(sumber : www.bi.go.id, data diolah)

Terlihat dari 120 bank di Indonesia yang terdaftar di Bank Indonesia, terdapat 14 bank yang mengungkapkan dan mempublikasikan *sustainability report*. Karena *sustainability report* merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan maka hal tersebut juga didukung oleh pemerintah dengan adanya peraturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada pasal 66 ayat (2) bagian C disebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, perusahaan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 74 ayat 1, dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa, "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan"(Rahmatullah & Kurniati, 2011).

Selain itu, pada tahun 2012 pemerintah juga mengeluarkan peranturan pemerintah no 47 Tahun 2013. Pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa "Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang" dan pada pasal 7 menyebutkan bahwa "Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"(Menteri Hukum dan HAM RI, 2012).

Adapun menurut Muliaman (dalam Yoga, 2016) perbankan membuat *sustainability report* adalah salah satu tujuannya yaitu *sustainable finance* dimana program *sustainable finance* tidak hanya berupaya untuk meningkatkan porsi pembiayaan namun juga untuk meningkatkan daya tahan dan daya saing lembaga jasa keuangan. *Sustainable finance* pun adalah dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang dihasilkan dari keseimbangan antara kepentingan ekonomi (*profit*), sosial (*people*), dan lingkungan hidup (*planet*).

Sustainable finance yang dimaksud tersebut adalah industri jasa keuangan diharapkan melakukan studi kelayakan sebelum memutuskan untuk melakukan pembiayaan sebuah proyek. Selain itu industri jasa keuangan juga tidak hanya berpatokan pada *return on asset* (ROA) saja ketika membiayai proyek tapi juga harus melihat dampak lingkungan dan sosial terhadap proyek tersebut (OJK, 2014).

Namun menurut Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia (UI) yang juga mantan Menteri Lingkungan Hidup di era Orde Baru Emil Salim yang dikutip dari *finance detik.com* pada tanggal 15 November 2016 melontarkan kritik. “Selama ini dalam menyalurkan kredit, perbankan tidak mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan. Padahal, seharusnya mereka tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi semata tapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan. Jika hanya memperhitungkan aspek keekonomian saja, pembangunan tidak akan berkelanjutan dalam jangka panjang. Sebab, kerusakan alam akan membahayakan seluruh makhluk hidup, termasuk manusia.

Hal tersebut terbukti dengan salah satu media online *beritagar.id* pada tanggal 16 November 2016 dan diunduh pada tanggal 23 Januari 2017, mengungkapkan bahwa berdasarkan penelitian Rainforest Action Network, TuK (Transformasi untuk Keadilan) Indonesia, dan Profundo menyebutkan, setidaknya ada sekitar USD3,890 miliar atau sekitar Rp51,9 triliun (kurs Rp13.350) kredit perbankan nasional mengalir ke perusahaan-perusahaan yang diduga membawa dampak buruk bagi lingkungan.

Terdapat delapan bank yang diketahui menyalurkan kredit dalam bentuk modal kerja maupun kredit investasi ke sektor usaha yang salah satunya disebut sebagai penyebab kebakaran lahan selama ini. Bank itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Pan Indonesia Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Capital Indonesia, dan PT Bank Pembangunan Daerah DKI. Dari kasus tersebut terlihat bahwa perbankan di Indonesia belum secara penuh menerapkan *sustainable finance*. Terlihat pula dari

yang sudah dijelaskan bahwa dari 120 perbankan hanya 14 bank yang mengungkapkan *sustainability report*.

Banyak faktor yang menyebabkan perusahaan salah satunya perbankan tidak mengungkapkan *sustainability report*. Menurut Ali Darwin, Chairman *National Center for Sustainability Report* (NSCR) yang dilansir dari investasi.kontan.co.id (2014). “Faktor yang membuat perusahaan enggan membuat *sustainability report* yaitu perusahaan tersebut tidak transparan dalam menjalankan bisnisnya, dan tidak memiliki komitmen menjadi perusahaan GCG (*good corporate governance*)”.

Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Muh Arief Effendi (2016, hlm. 214) karena *sustainability report* merupakan implementasi dari GCG, karena salah satu prinsip GCG adalah masalah pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Oleh karena itu *Good Corporate Governance* merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengungkapan *sustainability report*.

Tabel 1.3
Peringkat Self Assessment GCG Bank Yang Bermasalah

No	Nama Bank	Peringkat Self Assessment GCG	Pengungkapan
1	Bank Mandiri	2	Mengungkapkan
2	Bank Negara Indonesia	2	Mengungkapkan
3	Bank Rakyat Indonesia	1	Mengungkapkan
4	Bank Central Asia	1	Mengungkapkan
5	Bank Pan Indonesia	2	Tidak Mengungkapkan
6	Bank Danamon Indonesia	2	Mengungkapkan
7	Bank Capital Indonesia	2	Tidak Mengungkapkan
8	Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta	2	Tidak Mengungkapkan

(sumber : laporan tahunan & web resmi bank, data diolah)

Namun terlihat pada tabel, Bank Mandiri dengan peringkat *self assessment* GCG nya 2 yaitu “baik”, melakukan pengungkapan *sustainability report*. Namun Bank Pan Indonesia, Bank Capital & Bank DKI yang mempunyai peringkat sama

yaitu 2, bank tersebut tidak mengungkapkan *sustainability report*. Bank Indonesia pada tanggal 30 Januari 2006 telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No, 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG. bagi Bank Umum sehingga dengan adanya peraturan tersebut maka bank diwajibkan melakukan penilaian mandiri (*Self Assessment*) atas pelaksanaan GCG, menyusun laporan pelaksanaan GCG tersebut secara berkala (Muh Arief Effendi, 2016, hlm. 141).

Selain itu, Pratama & Yulianto (2015) mengungkapkan bahwa perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang kuat, juga akan mendapatkan tekanan yang lebih dari pihak eksternal perusahaan untuk lebih mengungkapkan pertanggung jawaban sosialnya secara luas. Penilaian terhadap kinerja keuangan pun antara lain dapat dilihat dari kemampuan perusahaan menghasilkan laba (*profit*), dan Anggraini (dalam Kurnianingsih, 2013) mengungkapkan bahwa rasio profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.

Tabel 1.4
ROA Tahun 2015 Bank yang Bermasalah

No	Nama Bank	ROA thn 2015	Pengungkapan
1	Bank Mandiri	3,15 %	Mengungkapkan
2	Bank Negara Indonesia	2,6 %	Mengungkapkan
3	Bank Rakyat Indonesia	4,19 %	Mengungkapkan
4	Bank Central Asia	3,18 %	Mengungkapkan
5	Bank Pan Indonesia	1,13 %	Tidak Mengungkapkan
6	Bank Danamon Indonesia	1,20 %	Mengungkapkan
7	Bank Capital Indonesia	1,10 %	Tidak Mengungkapkan
8	Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta	0,89 %	Tidak Mengungkapkan

(sumber : laporan tahunan & web resmi bank, data diolah)

Terlihat pada tabel ketika ROA Bank Mandiri 3,15 % Bank Mandiri mengungkapkan *sustainability report*. Lebih lanjut ROA pada BRI yaitu 4,19 % juga mengungkapkan *sustainability report*, begitupun dengan BCA yang memiliki ROA 3,18 % pun mengungkapakan *sustainability report* dan terlihat Bank

Danamon walaupun ROA nya cukup kecil 1,20 % tetap mengungkapkan *sustainability report*. Begitupun terlihat Bank Pan Indonesia, Bank Capital Indonesia, dan Bank DKI yang memang mempunyai ROA terkecil diantara yang lainnya, bank tersebut memang tidak mengungkapkan *sustainability report*.

Pada penelitian sebelumnya banyak faktor yang mempengaruhi pengungkapan *sustainability report*, seperti pada penelitian Dilling (2010) menguji *size* (ukuran perusahaan), profitabilitas, pertumbuhan, struktur modal, *corporate governance*, dengan kualitas *sustainability report*. Variabel independen yang diuji, variabel profitabilitas, *governance committee*, ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaan berhubungan positif dengan kualitas pengungkapan *sustainability report* sedangkan jumlah anggota dan rapat anggota komite berhubungan negatif.

Selanjutnya, Khafid (2012) melakukan penelitian dengan variabel independennya yaitu karakteristik perusahaan, dan *corporate governance*. Dengan menggunakan sampel sektor pertambangan yang terdaftar di BEI penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, *governance committee* berperan positif terhadap publikasi *sustainability report* sedangkan *leverage*, dewan direksi, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap publikasi *sustainability report*.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sari & Marsono, (2013) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*, komite audit, dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan, dan likuiditas, *leverage*, aktivitas perusahaan, ukuran perusahaan, dan dewan direksi tidak menunjukkan pengaruh. Namun penelitian Aulia & Syam (2013) yang berjudul Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Praktek Pengungkapan *Sustainability Reporting* menunjukkan bahwa secara parsial hanya tipe perusahaan dan ukuran perusahaan yang berpengaruh terhadap *sustainability report*. Sedangkan *leverage* dan profitabilitas tidak berpengaruh.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Jo, Song, & Tsang (2015) yang berjudul *Corporate social responsibility and stakeholder governance around the*

world menunjukkan bahwa stakeholder secara positif mempengaruhi keterlibatan CSR lebih besar daripada dewan komisaris. Pengaruh stakeholder dalam keterlibatan CSR lebih berpengaruh ketika perlindungan investor dan tata kelola dewan relatif lemah. Selain itu pada penelitian Janggu, Darus, Zain, & Sawani, (2014), Alhazaimah, Palaniappan, & Almsafir (2014), Ienciu, Popa, & Ienciu (2012), menunjukkan bahwa dewan direksi dan komite audit berpengaruh terhadap keterbukaan informasi pengungkapan keberlanjutan.

Pada penelitian ini peneliti dipilih salah satu variabel independennya yaitu *Good Corporate Governance*(GCG) dan indikator GCG yang digunakan adalah *self assessment*. *Self assessment* tersebut sesuai dengan surat edaran baru BI yaitu SE BI Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013. Selain itu alasan peneliti mengambil indikator tersebut karena masih jarang penelitian yang menggunakan *self assessment* GCG sebagai indikator untuk melihat pengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* , rata-rata hanya diukur dengan struktur organisasi pengelolaan perusahaan, yaitu jumlah dewan direksi, jumlah dewan komisaris, jumlah komite audit, keberadaan *governance commite*.

Selain itu, karena pada beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda mengenai pengaruh profitabilitas terhadap *sustainability report* maka profitabilitas menjadi salah satu variabel independen pada penelitian ini. Adaun menurut Pratama & Yulianto (2015), pengungkapan *sustainability report* juga dipengaruhi oleh profitabilitas. Karena Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung untuk mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan karena ingin menunjukkan kepada publik dan *stakeholders* bahwa perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain pada industri yang sama. Oleh karena itu, berdasarkan uraian yang telah dijelaskan mengenai fenomena dan teori maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Pengaruh Good Corporate Governance dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Sustainability Report”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap pengungkapan *sustainability report*?

2. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *sustainability report*?
3. Bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* dan profitabilitas secara simultan terhadap pengungkapan *sustainability report*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap pengungkapan *sustainability report*.
2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *sustainability report*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* dan profitabilitas secara simultan terhadap pengungkapan *sustainability report*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Dari segi teori diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai *sustainability report*, *good corporate governance* dan profitabilitas. Serta bahan referensi untuk peneliti selanjutnya mengenai *sustainability report*, *good corporate governance* dan profitabilitas.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya pertanggungjawaban ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan, sehingga memberikan dorongan bagi perusahaan untuk berperan aktif dalam kegiatan tanggung jawab sosial serta mengungkapkannya dalam laporan yang disebut *Sustainability Report*.